

**HUBUNGAN ANTARA STIGMA DISABILITAS DENGAN INTERAKSI GURU-
SISWA PENYANDANG DISABILITAS PADA SEKOLAH DASAR INKLUSI**

Diah Wahyu Ningsih

15000118130145

Fakultas Psikologi

Universitas Diponegoro

dwningsih@students.undip.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan inklusi merupakan salah satu alternatif belajar bagi siswa penyandang disabilitas. Interaksi guru-siswa menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pembelajaran. Sedangkan interaksi guru-siswa dapat dipengaruhi oleh label dan stereotip yang merupakan bagian dari stigma. Interaksi guru-siswa memiliki pengaruh pada perkembangan sosio-emosi siswa di masa depan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara stigma disabilitas dengan interaksi guru-siswa penyandang disabilitas pada sekolah dasar inklusi. Guru sekolah dasar negeri inklusi di Kota Salatiga dipilih untuk menjadi populasi penelitian ini dengan jumlah 190 orang dari 20 sekolah dasar negeri inklusi. Teknik *cluster random sampling* dipilih dan memperoleh sampel minimum 129 orang dari 15 sekolah.. Pengumpulan data dilakukan menggunakan Skala Interaksi Guru-Siswa Penyandang Disabilitas (14 aitem, $\alpha = 0,822$) dan Skala Stigma Disabilitas (19 aitem, $\alpha = 0,900$). Analisis data dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik *Rank Spearman*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan negatif yang signifikan antara stigma disabilitas dengan interaksi guru-siswa penyandang disabilitas pada sekolah dasar inklusi ($N = 130$, $r_{ho} = -0,404$, $p = 0,000$, $p < 0,05$). Artinya, semakin rendah tingkat stigma disabilitas yang dimiliki oleh guru, maka semakin tinggi kualitas interaksi guru-siswa penyandang disabilitas begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan untuk guru agar memperhatikan cara pandang dan interaksinya dengan siswa khususnya siswa penyandang disabilitas.

Kata kunci: stigma disabilitas, interaksi guru-siswa, sekolah inklusi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya pendidikan inklusi dimulai dengan adanya *The Salamanca Statement on Inclusive Education* yang digelar pada Juni 1994 di Salamanca, Spanyol. *The Salamanca Statement on Inclusive Education* berisi mengenai kesempatan belajar yang sama bagi penyandang disabilitas dan sekolah, sebagai penyelenggara pendidikan, harus menerima setiap siswa, termasuk penyandang disabilitas (UNESCO, 1994).

Di Indonesia, pendidikan inklusi dimulai dari Deklarasi Bandung tahun 2004 yang menegaskan mengenai komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusi. Selanjutnya, beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang pendidikan pada siswa penyandang disabilitas telah ditetapkan, antara lain UU No. 20 tahun 2003 yang mengatur pendidikan bagi penyandang disabilitas (Herawati, 2016), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa dan UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Misalnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pendidikan inklusi adalah:

“sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya” (p. 2).

Berdasarkan definisi tersebut, pendidikan inklusi adalah sebuah sistem yang dirancang bagi siswa penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan sebagaimana siswa non disabilitas. Bahkan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional juga menyebutkan bahwa setiap pemerintah tingkat kabupaten atau kota wajib memiliki setidaknya satu sekolah inklusi pada setiap jenjangnya. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai menaruh perhatian bagi penyandang disabilitas dalam ranah pendidikan, terlihat dengan adanya kewajiban bagi setiap pemerintah kota/kabupaten untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi. Adanya peraturan tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah ingin mencapai *Sustainable Development Goals* nomor empat yaitu menetapkan pendidikan berkualitas yang inklusi dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi setiap individu (UNESCO, 2015).

Pada tahun 2012, Kota Salatiga mencanangkan diri untuk menjadi kota inklusi. Berdasarkan pada Peraturan Walikota Salatiga no. 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, sekolah tidak boleh menolak siswa penyandang disabilitas. Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Salatiga mengeluarkan Peraturan Walikota no. 12 Tahun 2019 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Inklusi/SRC Kota Salatiga serta menyatakan semua sekolah menuju inklusi. Lukitasari dkk (2017) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di Kota Salatiga. Hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan pendidikan inklusi di Kota Salatiga tergolong baik dengan ketercapaian 65%.

Keberadaan pendidikan inklusi membawa dampak positif dalam perkembangan siswa penyandang disabilitas dalam aspek akademik maupun sosial

(Asiyah, 2018). Dalam aspek akademik, pendidikan inklusi memiliki efek positif dalam ketercapaian belajar siswa lamban belajar (Suparno dkk, 2019). Sedangkan pada aspek sosial, pendidikan inklusi dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa penyandang disabilitas diperlakukan sama (Jauhari, 2017; Pratiwi, 2015) dan bagi siswa non disabilitas, pendidikan inklusi dapat meningkatkan sikap tolong menolong dan menghargai perbedaan karena seringnya berinteraksi dengan siswa penyandang disabilitas dalam lingkungan yang beragam (Ajuwon, 2008; Dewi, 2017; Kadir, 2015).

Meskipun diatur oleh organisasi pendidikan dunia dan memiliki dampak yang positif, tetapi pendidikan inklusi mengalami berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Di Portugal, tantangan yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya guru dalam pengajaran dan kurikulum, hampir 98,9% siswa bersekolah di sekolah inklusi tetapi memiliki jumlah pengajar yang terbatas (Alves dkk., 2020). Sedangkan di Indonesia, tantangan terbesar pelaksanaan pendidikan inklusi adalah sosialisasi dengan masyarakat terkait keberadaan pendidikan inklusi (Lukitasari dkk., 2017) ketersediaan kurikulum (Pratiwi, 2015; Tarnoto, 2016), sarana prasarana, dukungan dari orang tua (Anjarsari dkk., 2018; Tarnoto, 2016), kebijakan, sistem organisasi yang mendukung (Suhendri, 2020) dan ketersediaan guru (Anjarsari dkk., 2018; Lukitasari dkk., 2017; Pratiwi, 2015; Tarnoto, 2016).

Guru di Indonesia belum mendapatkan pelatihan yang cukup dan memiliki pengalaman yang kurang (Tarnoto, 2016; Triwulandari & Pandia, 2015) sehingga kualitas yang dimiliki oleh guru di sekolah inklusi rendah (Lukitasari dkk., 2017). Kurangnya pengalaman mengakibatkan guru memiliki efikasi diri yang rendah

(Cappe dkk., 2021; Chao dkk., 2018; Malinen dkk., 2013; Yada dkk., 2018) dan memberikan sikap yang berbeda pada siswa penyandang disabilitas (Elisa & Wrastari, 2013). Sikap yang berbeda muncul karena faktor lingkungan, pandangan sosial, serta kepercayaan guru terhadap siswa penyandang disabilitas (Triwulandari & Pandia, 2015). Sikap yang diberikan oleh guru terhadap siswa penyandang disabilitas dapat berpengaruh terhadap komitmen profesionalnya sebagai seorang guru yang harus memberikan pembelajaran secara adil kepada seluruh siswa. Komitmen guru sangat berperan penting dalam interaksi dengan siswa ketika proses belajar mengajar berlangsung (Bansal, 2016). Di Kota Salatiga, pendidikan inklusi melibatkan adanya guru pendamping khusus (GPK) yang mendapat penilaian baik karena jumlahnya melebihi standar yang ditetapkan dan memiliki latar belakang pendidikan luar biasa atau mendapat pelatihan khusus. Guru pendamping khusus memiliki waktu yang terbatas dalam mengajar siswa penyandang disabilitas merangkap sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK. Tetapi memiliki frekuensi interaksi yang lebih sering sebagai guru pendamping khusus dan sebagai guru kelas ataupun guru mata pelajaran (Lukitasari dkk, 2017).

Penelitian menemukan bahwa interaksi guru-siswa memiliki kontribusi positif terhadap hasil belajar siswa (Nureva & Citra, 2019). Interaksi guru-siswa menjadi indikator penting dalam peningkatan proses belajar proses belajar siswa (Allen dkk., 2013; Hafen dkk., 2015), capaian hasil belajar siswa (Galih & Alsa, 2019; Sun dkk, 2022) dan berperan penting dalam keberhasilan pendidikan inklusi (Jordan & Stanovich, 2001). Interaksi guru-siswa dalam pendidikan inklusi dapat

memberikan motivasi terhadap siswa dan memberikan rasa nyaman karena siswa penyandang disabilitas dapat berinteraksi dengan siswa lainnya (Pangestu, 2019).

Cameron (2014) menyebutkan bahwa interaksi guru terhadap siswa penyandang disabilitas terjadi lebih sering dibandingkan dengan siswa reguler. Sebaliknya, penelitian lain menyebutkan bahwa interaksi guru dan siswa penyandang disabilitas yang terjadi cenderung rendah (Jordan & Stanovich, 2001; McIntosh dkk., 1993). Keberhasilan interaksi guru-siswa di dalam kelas dipengaruhi oleh sikap guru kepada siswa penyandang disabilitas (Costea-Bărluțiu & Rusu, 2015; Doumit dkk., 2019; Jury dkk., 2021; Lindblom dkk., 2020), stereotip (Krischler dkk., 2018), dan label (Shifrer, 2013) yang merupakan manifestasi sekaligus aspek dari stigma (Arboleda-Flórez, 2008; Link & Phelan, 2001). Penelitian menunjukkan bahwa sikap dan stereotip secara implisit berpengaruh terhadap perlakuan guru terhadap siswa karena sikap dan stereotip yang buruk akan mempengaruhi ekspektasi guru terhadap pencapaian siswa dan menyebabkan lebih terbatasnya kesempatan yang diberikan oleh guru terhadap siswa selama proses belajar (Denessen dkk., 2020). Penelitian lain menyebutkan bahwa sikap guru memiliki pengaruh terhadap capaian belajar siswa dan capaian siswa berkaitan dengan ekspektasi guru (Hornstra dkk., 2010). Penelitian menunjukkan bahwa guru cenderung memiliki ekspektasi akademik yang rendah terhadap siswa penyandang disabilitas (Shifrer, 2013). Rendahnya ekspektasi terhadap siswa penyandang disabilitas karena guru dan lembaga pendidikan menganggap hasil belajar siswa penyandang disabilitas tidak kompetitif dan ketidakmungkinan mencari kerja bagi

penyandang disabilitas. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari stigma (Buljevac dkk., 2012).

Pandangan negatif terhadap siswa penyandang disabilitas di sekolah masih sering terjadi yang menyebabkan tidak maksimalnya layanan yang diterima oleh siswa (Froese-Germain & Riel, 2012). Terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa guru cenderung memiliki stereotip negatif terhadap siswa penyandang disabilitas. Stereotip negatif akan mempengaruhi proses interaksi antara guru sebagai orang yang memberikan dan siswa penyandang disabilitas sebagai orang yang menerima (Metzger & Hamilton, 2020). Stereotip terbentuk sejak siswa memperoleh label ‘penyandang disabilitas’ dan membentuk sebuah anggapan di masyarakat sehingga terbentuklah stigma. Sebuah studi kualitatif menemukan bahwa terdapat 25 dari 30 guru yang memberikan stigma negatif terhadap siswa penyandang disabilitas dengan menyatakan bahwa siswa penyandang disabilitas berbeda sehingga memerlukan pendidikan berbeda di lingkungan yang terpisah (Lalvani, 2015).

Pada usia anak-anak, interaksi guru-siswa sangat penting karena mempengaruhi perkembangan sosial dan akademik anak (Baker, 1999). Pola interaksi yang diberikan oleh guru pada siswa di sekolah dasar memiliki potensi besar ditiru oleh siswa lainnya dalam memperlakukan teman sebayanya di masa yang akan datang (Luckner & Pianta, 2011) dibandingkan jenjang sekolah menengah pertama (Rohman & Sadewo, 2014) dan sekolah menengah atas (Rahmanto, 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola interaksi jenjang sekolah dasar memiliki peran penting. Hal tersebut juga didukung

oleh beberapa teori perkembangan kognitif, emosi, dan sosial yang menyebutkan bahwa pada masa sekolah dasar, anak berada pada tahap identifikasi terhadap apa yang diperlihatkan lingkungan dan menirukannya (Dewi dkk., 2020; Marinda, 2020).

Terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa interaksi guru-siswa pada jenjang sekolah dasar memberikan beberapa dampak pada siswa seperti meningkatkan kreativitas (Hakim, 2017), motivasi dalam pembelajaran (Sumampow dkk., 2019) dan juga ketercapaian belajar siswa ke depannya (Luckner & Pianta, 2011). Kompetensi sosial emosi anak berkembang melalui pengalaman berinteraksi dengan orang lain, dan pada jenjang sekolah dasar memungkinkan perkembangan tersebut melalui interaksi dengan guru (Ardiani dkk., 2017; Dewi dkk., 2020; Thijs dkk., 2011). Kurniawati (2018) menyebutkan guru memiliki peran yang penting dalam memberikan dukungan emosional pada siswa. Ratkos (2017) menyebutkan bahwa pada jenjang sekolah dasar, siswa membutuhkan interaksi personal dalam pembelajaran. Tetapi sering kali interaksi guru-siswa mengalami bias karena siswa penyandang disabilitas dianggap tidak kompeten dan guru membatasi keberhasilan siswa penyandang disabilitas (Krischler dkk., 2018).

Penelitian mengenai interaksi guru-siswa penyandang disabilitas masih terbatas pada bahasan tentang pola interaksi yang terjadi di dalam kelas (Jordan & Stanovich, 2001; Pangestu, 2019; Widyastuti, 2016), karakteristik bahasa yang digunakan (Yulizar dkk., 2019), dan konstruksi alat ukur (Kurniawati, 2018) dan belum melibat adanya variabel lain seperti stigma disabilitas. Pentingnya melibatkan variabel stigma disabilitas dalam penelitian interaksi guru-siswa

penyandang disabilitas karena adanya penemuan yang mengatakan bahwa jika seseorang memberikan stigma, maka terdapat kemungkinan munculnya diskriminasi dan perlakuan yang berbeda pada siswa yang menerima stigma (Link & Phelan, 2014). Oleh karena itu, penelitian tentang hubungan antara stigma disabilitas dengan interaksi guru-siswa pada sekolah dasar inklusi diperlukan.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah apakah terdapat hubungan antara stigma disabilitas dengan interaksi guru-siswa penyandang disabilitas pada sekolah dasar inklusi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara stigma disabilitas dengan interaksi guru-siswa penyandang disabilitas pada sekolah dasar inklusi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu menambah literatur di bidang psikologi perkembangan anak berkebutuhan khusus, psikologi pendidikan, serta pendidikan inklusi dan luar biasa berkaitan dengan interaksi guru-siswa penyandang disabilitas dengan stigma disabilitas dari sudut pandang guru.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat penelitian bagi institusi sekolah dapat dijadikan acuan

untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusi yang dimiliki oleh sekolah tersebut.

- b. Manfaat penelitian bagi guru dapat lebih memahami bagaimana interaksi guru- siswa mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah yang menyediakan layanan pendidikan inklusi.
- c. Menjadi rujukan penelitian selanjutnya dengan topik serupa.